

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 lalu diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.¹ Dari 270 daerah yang mengikuti pilkada, ditemukan masih cukup masih diikuti oleh calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik, setidaknya ditemukan 124 kandidat yang berasal dengan dinasti politik.²

Praktek dinasti politik terjadi karena suatu kelompok keluarga berupaya untuk membangun kekuasaan di satu daerah tertentu. Faktor pendukung dinasti dapat tercipta ialah karena bakal calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik memiliki keunggulan-keunggulan elektoral, seperti modal ekonomi, popularitas, serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh dari kekerabatan politik. Sehingga dengan faktor ini mendorong partai politik untuk lebih tertarik mengusung bakal calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik.³

Upaya untuk mencegah dinasti politik diciptakan sudah pernah dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 huruf r, yang menyatakan syarat untuk

¹ *Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, 27 september 2021 pukul 21:06 WIB

² *Pers Release 124 Dinasti Politik Bertarung dalam Pilkada Serentak 2020*, diakses dari <https://nagarainstitute.com/pers-release-124-dinasti-politik-bertarung-dalam-pilkada-serentak-2020/>, pada 27 September 2021 pukul 21:10 WIB

³ Budhy Prianto, *Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pilkada, dan Desentralisasi*, Publisia Vol. 1 No. 2, Oktober: 2016, hal. 105.

mencalonkan ialah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.⁴ Akan tetapi larangan tersebut dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dikeluarkannya Keputusan MK atas Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 7 huruf r dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat (2).⁵

Fenomena dinasti politik di daerah tercipta setelah reformasi yang diharapkan akan lebih demokratis dibandingkan dengan orde baru. Sentralisasi kekuasaan di masa orde baru membuat daerah tidak mempunyai kewenangan dan berdampak pada kebijakan yang dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan sarat akan kepentingan pusat.⁶ Akan tetapi pola yang sama kembali terjadi setelah reformasi bahwa kekuasaan di daerah hanya dipegang oleh satu kelompok elit dan dipertahankan dengan membentuk dinasti politik.⁷

Pada masa pemerintahan orde baru, dalam memilih kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengajukan nama calon kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Setelah itu Presiden lah yang menentukan siapa kepala daerah terpilih. Sistem pemilihan kepala daerah seperti ini sulit menetapkan calon kepala daerah dengan kualifikasi yang sesuai dengan daerah tersebut.

Selain itu kepala daerah yang terpilih merupakan elit politik yang memiliki jaringan dengan pemerintahan pusat pada saat itu yaitu elit golkar dan militer.⁸

⁴ *Ibid*, hal. 106.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*, hal. 107.

⁷ *Ibid*.

⁸ Rizky Ferianto, *Politik Lokal Dalam Efektivitas Pemerintahan Daerah*, BPPN, 2014, hal. 16.

Fokus pemerintah orde baru yaitu pembangunan nasional menjadi dalih untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah. Elit lokal yang mempunyai jaringan dengan pemerintah pusat, yaitu Golkar dan militer memperoleh sebagian keuntungan dari hasil eksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut.⁹

Reformasi kemudian menumbangkan pemerintahan orde baru yang sentralistik. Otonomi daerah lahir dan memberikan perkembangan demokrasi bagi daerah untuk mengelola kebijakan dan keuangan yang sebelumnya diurus oleh pemerintahan pusat.¹⁰ Sistem pemilihan kepala daerah juga berubah seiring dengan lahirnya otonomi daerah. Kepala daerah dipilih melalui DPRD tanpa harus mengajukan nama calon kepala daerah tersebut ke presiden seperti masa orde baru. Kemudian pada tahun 2004 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, dan DPRD berwenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah.¹¹

Pilkada langsung merupakan langkah demokratis bagi daerah karena kepala daerah terpilih nantinya mendapat legitimasi langsung dari suara rakyat, tidak terikat oleh partai-partai yang ada dalam DPRD, serta tidak memiliki jaringan dengan pemerintahan pusat seperti yang ditemui pada masa orde baru.¹² Tetapi pilkada langsung dalam perjalanannya tidak sesuai harapan untuk menjadikan daerah yang lebih demokratis.

⁹ *Ibid.*, hal. 17.

¹⁰ Kisno Hadi, *Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Otonomi Daerah*, POLITIKA Vol. 1 No. 2, 2015, hal. 6.

¹¹ *Ibid.*

¹² Teten Jamaludin, *Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika*, JPW (Jurnal Politik Walisongo), Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 32.

Elit lokal dapat mendominasi kekuasaan di daerah dengan mendistribusikan anggota keluarganya dan menciptakan dinasti politik. Setelah berhasil menciptakan dinasti politik, kekuasaan di pertahankan oleh keluarga tersebut dengan cara dipersiapkan dalam sistem politik kemudian dipilih melalui pemilihan yang demokratis. Tentunya tujuan dari elit menciptakan dinasti politik ini adalah untuk mengendalikan seluruh hal yang diperlukan oleh keluarganya.¹³

Kepala daerah yang berasal dari keluarga penguasa sah saja dalam demokrasi karena setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih. Akan tetapi jika kekuasaan tersebut hanya menyebar di satu keluarga akan menimbulkan kekuasaan yang absolut sehingga penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Penyalahgunaan kekuasaan dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang membangun dinasti.

Daerah yang dikuasai oleh dinasti politik salah satunya adalah Provinsi Banten. Dinasti politik di Banten diciptakan oleh Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten yang menjabat dari tahun 2007-2013. Saat Atut menjabat sebagai Gubernur Banten, Atut membangun dinasti politik dengan menempatkan keluarganya dalam kursi kekuasaan di beberapa kabupaten/kota di Banten. Kekuasaan di Banten hampir di dominasi oleh keluarga Atut mulai dari kekuasaan eksekutif, legislatif sampai kepada pengurus partai Golkar di Banten.¹⁴

Keluarga Atut yang menjabat di lembaga eksekutif antara lain adalah: Adik tiri Atut Th. Khaerul Jaman menjadi Wakil Walikota Serang periode 2008-

¹³ Masda Putri Amelia, Skripsi: *Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015, hal. 12.

¹⁴ Mhd.Al Fajri Sukri, *Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik, dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*, JISPO Vol. 10 No. 2, 2020, hal. 178.

2013, Heryani ibu tiri Atut menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang periode 2010-2015, Adik ipar Atut yaitu Airin Rachmi Diany menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan periode 2011-2016.

Kekuasaan keluarga Atut di lembaga legislatif antara lain: Andika Hazrumy anak pertama Atut menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Banten pada periode 2009-2014, Menantu Atut Ade Rossi Khaerunisa menjadi anggota DPRD Kota Serang pada periode 2009-2014, Ratu Tatu Chasanah adik kandung Atut menjadi anggota DPRD Banten periode 2010-2015. Kemudian Ratna Komalasari yang adalah ibu tiri Atut menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang periode 2009-2014.¹⁵

Selain memegang kekuasaan politik, keluarga Atut juga memegang kekuasaan ekonomi. Adik Atut, Tubagus Wardana Chaeri (Wawan) merupakan tokoh yang tidak masuk dalam struktur politik tetapi dapat mengatur untuk membentuk dinasti politik Atut dan meningkatkan ekonominya.¹⁶ Sebagai seorang pengusaha usaha, Wawan meningkatkan ekonomi dengan cara mengatur agar pengerjaan proyek yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diserahkan kepada perusahaan Wawan.¹⁷

Salah satu proyek yang diaturnya adalah pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran (TA) 2012, dimana proyek ini diatur agar dapat dipegang oleh perusahaan milik Wawan

¹⁵ *Ibid*, hal. 171.

¹⁶ Erwin Saputra Muhammad, Skripsi: *Tumbuhnya Oligarki Lokal: Kekuasaan Ekonomi dan Politik Tubagus Chaeri Wardana di Kota Tangerang Selatan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hal. 43.

¹⁷ *Ibid*, hal. 71.

PT. Bali Pacific.¹⁸ Pada saat itu Wawan memiliki kekuasaan kepada birokrat untuk mengamankan proyek ini agar jatuh kepada perusahaannya karena istrinya, Airin Rachmi Diany adalah Walikota Tangerang Selatan pada saat itu.

Atut dan Wawan merupakan aktor yang mempunyai kekuasaan agar dapat terus memegang kekuasaan politik dan ekonomi di Banten. Tetapi keduanya tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara pilkada Kabupaten Lebak dan atas kasus pengadaan sarana dan prasana alat kesehatan provinsi Banten dan Tangerang Selatan.¹⁹

Tertangkapnya Atut dan adiknya Wawan tidak meruntuhkan eksistensi dinasti politiknya. Keluarga Atut yang mengikuti Pilkada di beberapa kabupaten/kota di Banten pada tahun 2015, 2017, dan 2020 tetap terpilih sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Keluarga Atut yang menang dalam pilkada 2015 ialah adik iparnya, Airin Rachmi Diany pada Pilkada Kota Tangerang Selatan.²⁰ Ini merupakan periode keduanya menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan.

Kemudian Ratu Tatu Chasanah adik kandung Atut terpilih menjadi Bupati Serang, Tanto Warsono menantu Atut terpilih menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang Pilkada 2017, anak Atut yaitu Andika Hazrumy terpilih menjadi Wakil Gubernur Banten berpasangan dengan Wahidin Halim.²¹ Inilah nama-nama

¹⁸ *Ibid*, hal. 75.

¹⁹ Mhd. Al Fajri Sukri, *Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik, dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*, JISPO Vol. 10 No. 2, 2020, hal. 172.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

keluarga Atut yang masih mendapatkan suara di Pilkada setelah Atut dan Wawan menjadi tersangka korupsi.

Kota Tangerang Selatan salah satu daerah yang dikuasai oleh dinasti Atut. Tangerang Selatan merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang berdiri pada tahun 2008.²² Tangerang Selatan sudah melaksanakan 2 kali pemilihan kepala daerah pada tahun 2010 dan 2015, kedua pilkada tersebut mengeluarkan Airin Rachmi Diany, istri dari Tubagus Chaeri Wardana yang berarti adik ipar dari Atut sebagai walikota.²³

Untuk mempertahankan kekuasaan keluarganya di Tangerang Selatan dinasti Atut kembali mengikuti pilkada 2020 dengan menempatkan Pilar Saga Ichsan, anak dari Ratu Tatu Chasanah, adik Atut yang juga menjabat sebagai Bupati Serang dan Ketua DPD I Golkar Provinsi Banten hingga sekarang. Pilar Saga Ichsan ditempatkan sebagai calon wakil walikota dan dipasangkan bersama Benyamin Davnie sebagai calon walikota, dimana Benyamin juga masih mempunyai jaringan kepada Airin saat mereka menjabat sebagai walikota dan wakil walikota di Tangerang Selatan selama dua periode.

Pilkada Tangsel tahun 2020 terdapat tiga pasangan calon yang berkonstelasi. Dua lawan Benyamin-Pilar juga mempunyai hubungan keluarga dengan penguasa. Pertama, pasangan calon Muhammad dan Rahayu Saraswati. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merupakan keponakan dari Prabowo Subianto seorang politisi Gerindra dan Menteri Pertahanan. Kedua, pasangan

²² *Sejarah Kota Tangerang Selatan*, diakses dari <https://www.tangerangselatankota.go.id/>, pada 19 Februari pukul 20:07 WIB

²³ *Op, Cit.*, hal. 179.

calon Azizah-Ruhamaben. Siti Nur Azizah adalah putri kandung Wakil Presiden Ma'aruf Amin.²⁴

Meskipun Atut sebagai pendiri dinasti beserta adiknya Wawan sudah tersandung kasus korupsi dan di penjara, eksistensi dinasti Atut masih bertahan dan berhasil menang dalam pilkada khususnya di kota Tangerang Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menganalisis bagaimana tercipta dan faktor apa yang menyebabkan dinasti Atut masih bertahan di Pilkada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, dinasti politik tercipta untuk mendominasi kekuasaan di suatu daerah sehingga memasukan keluarganya dalam jabatan politik. Tujuan dari dinasti politik ini tentunya mengendalikan seluruh hal yang diperlukan oleh keluarganya. Dinasti politik yang masih eksis hingga saat ini adalah dinasti politik Atut di provinsi Banten. Atut menciptakan dinasti politik dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan eksekutif, legislatif dan pengurus partai Golkar di beberapa kabupaten/kota di provinsi Banten.

Salah satu daerah di Banten yang di kuasai oleh dinasti Atut adalah Kota Tangerang Selatan. Keluarga Atut yang berkuasa di Tangerang Selatan ialah Airin Rachmi Diany, yang menjadi walikota sejak Kota Tangerang Selatan menentukan walikota definitif yaitu tahun 2011 hingga tahun 2021.

²⁴ *Menanti Perang Dinasti Pilkada 2020 di Tangerang Selatan*, diakses dari <https://tirto.id/f4Ei> , pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 20:49.

Tahun 2013 Atut tertangkap atas kasus korupsi. Tertangkapnya Atut dipandang para pengamat sebagai titik awal runtuhnya dinasti politik di Banten. Akan tetapi tetap saja pilkada pada tahun 2015, 2017 dan 2020 yang diikuti oleh keluarga Atut keluar sebagai pemenang pilkada khususnya pilkada di Tangerang Selatan tahun 2020.

Pilkada Kota Tangsel tahun 2020 menempatkan Pilar Saga Ichsan, anak dari Ratu Tatu Chasanah, adik Atut yang juga menjabat sebagai Bupati Serang dan Ketua DPD I Golkar Provinsi Banten hingga sekarang. Pilar Saga Ichsan ditempatkan sebagai calon wakil walikota dan dipasangkan bersama Benyamin Davnie sebagai calon walikota, dimana Benyamin juga masih mempunyai jaringan kepada Airin saat mereka menjabat sebagai walikota dan wakil walikota di Tangerang Selatan selama dua periode.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, rumusan masalah yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimana terciptanya dinasti politik di Kota Tangerang Selatan?
2. Apa faktor yang membuat dinasti politik tersebut bertahan di Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana dinasti politik tercipta pada pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020.

2. Mengetahui apa faktor yang membuat dinasti politik tersebut dapat bertahan.

I.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran dan ilmu terhadap pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan dinasti politik, politik lokal, pemilihan kepala daerah, serta memberikan pengetahuan mengenai praktek dinasti politik yang ada dalam pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan 2020. Kemudian penelitian ini menjadi salah satu syarat menjadi sarjana di Program Studi Ilmu Politik Universitas Nasional.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi ke dalam 3 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka memuat mengenai penelitian terdahulu yang orang lain lakukan, yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti. Kemudian membandingkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu tersebut. kemudian dalam bab ini juga

membahas dan menguraikan teori yang penulis pakai dalam penelitian sebagai pisau analisa. Adapun teori yang penulis pakai adalah Teori Dinasti Politik dan Teori Elit.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi pustaka.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Sejarah terbentuknya Kota Tangerang Selatan, Gambaran umum Kota Tangerang selatan seperti logo, visi dan misi, demografi dan sosial budaya. Kemudian mendeskripsikan juga mengenai Pilkada Tangsel dimulai pertama kali hingga Pilkada tahun 2020 serta Profil Pasangan Calon. Sub bab pembahasan penulis menguraikan temuan penelitian serta menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana dinasti politik tercipta di Kota Tangsel dan apa faktor yang menyebabkan bertahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang membahas tentang Dinasti Politik pada Pilkada Tangsel tahun 2020.